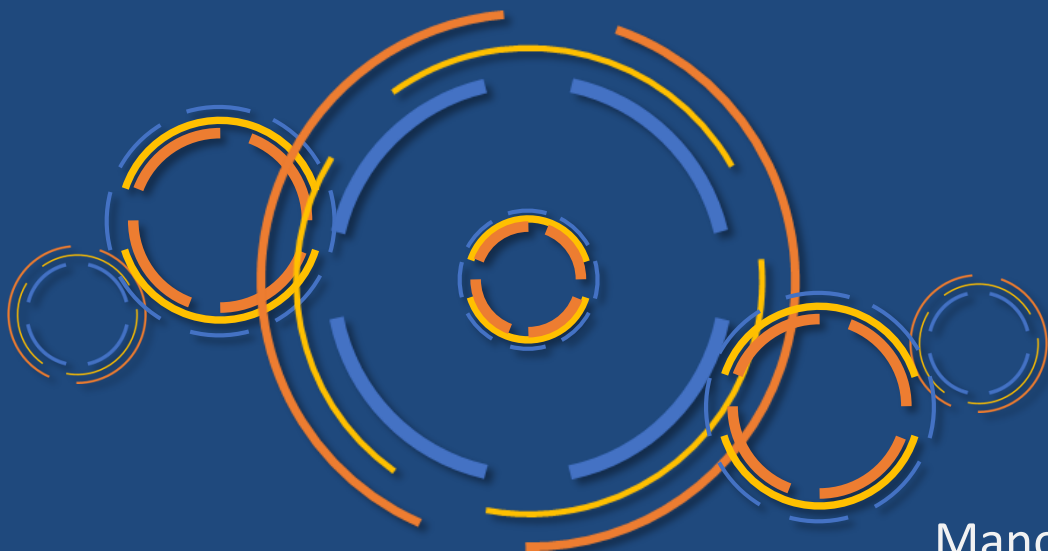




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANWIL DJPB PROVINSI PAPUA BARAT  
KPPN MANOKWARI

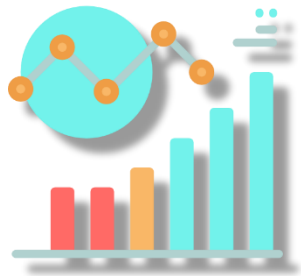


# AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018



Manokwari, 3-4 Oktober 2018





# REKONSILIASI DAN PELAPORAN



# BATAS WAKTU REKONSILIASI DAN PELAPORAN

<b>No.</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Batas Akhir</b>
1.	Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA (upload data SAIBA ke Aplikasi e-rekon-lk)	<b>19 Jan 2019</b>
2.	Penyampaian LK tingkat Satker ke UAPPA-W dan KPPN	<b>22 Jan 2019</b>
3.	Penyampaian LK tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1	<b>5 Feb 2019</b>
4.	Penyampaian LK tingkat UAPPA-E1 ke UAPA	<b>15 Feb 2019</b>

\*\* Dirjen Perbendaharaan dapat menetapkan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi, closing period data, dan penyampaian laporan keuangan selain yang ditetapkan dalam Peraturan ini



# MONITORING REKONSILIASI

No.	Periode	Jumlah Satker	Status
1.	Mei	18	Belum Rekon
		26	Menunggu Tanda Tangan KPA
2.	Juni	3	Belum Rekon
		20	Menunggu Tanda Tangan KPA
3.	Juli	9	Belum Rekon
		33	Menunggu Tanda Tangan KPA
4.	Agustus	9	Belum Rekon
		41	Menunggu Tanda Tangan KPA
5.	September	175	Belum Rekon
		29	Menunggu Tanda Tangan KPA

Sumber : Aplikasi E-Rekon - LK per 3 Oktober 2018 diakses pk. 07.30 WITA



# PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA



# PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA BULAN DESEMBER 2018

No.	Aktivitas	Batas Akhir
1.	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ bulan Desember 2018	<b>sama dengan tanggal batas akhir rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA</b>
2.	KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara bulan Desember 2018 kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan	22 Jan 2019

# MONITORING PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA

## LPJ Bendahara Pengeluaran

No.	Periode	Jumlah Satker	Jumlah Approve	Belum Rekon
1.	Mei	215	215	-
2.	Juni	215	215	-
3.	Juli	215	215	-
4.	Agustus	215	210	5 *)
5.	September	215	98	117

\*) 1 Satker telah menyampaikan LPJ, data masih salah  
Sumber : Aplikasi Sprint per 3 Oktober 2018 diakses pk 07.30 WITA



# MONITORING PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA

## LPJ Bendahara Penerimaan

No.	Periode	Jumlah Satker	Jumlah Approve	Belum Rekon
1.	Mei	31	31	-
2.	Juni	31	31	-
3.	Juli	31	31	-
4.	Agustus	31	31	-
5.	September	31	16	15

Sumber : Aplikasi Sprint per 3 Oktober 2018 diakses pk. 07.30 WITA





# **PENYELESAIAN SPM-GUP NIHIL/PTUP DAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG**



# PENYELESAIAN SPM-GUP NIHIL/SPM-PTUP



**KPPN**

**Melewati  
batas waktu?**



Pengajuan SPM-PTUP  
dan SPM-GUP Nihil  
**paling lambat tgl  
8 Januari 2019  
Diberi tanggal 31  
Desember 2018**

Apabila disebabkan pencurian/penyelewengan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi/pidana

Dapat diberikan UP TA 2019 dengan dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan

Pengajuan dispensasi dilampiri dengan;

- (1) kronologis kejadian;
- (2) Perkembangan penyelesaian kerugian negara;
- (3) Pernyataan Kepala Satker bahwa akan menyelesaikan kerugian negara tersebut; dan
- (4) Laporan pendukung lainnya.

Sedangkan, jika terlambat dipertanggungjawabkan.

UP/TUP TA 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dapat diperhitungkan dengan UP Tahun Anggaran 2019;

Bukti pengeluaran UP/TUP TA 2018 dipertanggungjawabkan sebagai bagian pertanggungjawaban UP TA 2019 melalui mekanisme penyelesaian tunggakan;

Satker merevisi DIPA TA 2019 untuk menampung bukti pengeluaran UP/TUP TA 2018 tersebut dan mencantumkan dalam hal. IV DIPA.

# PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

No.	Uraian	Pengajuan ke KPPN
1	SP2HL/SP4HL	7 Januari 2019
2	SP3HL-BJS/MPHL-BJS	7 Januari 2019



# **PENYELESAIAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN YANG LALU (TAYL)**



# DASAR HUKUM & RUANG LINGKUP



## Dasar Hukum

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 hal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu



## Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL adalah hibah langsung yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah

# TATA CARA PENYELESAIAN

Satker Penerima Hibah Barang/Jasa TAYL melakukan :



**Pencatatan  
Barang/Jasa**



**Pengajuan  
Permohonan  
Nomor Register**  
(Jika belum  
mendapatkan Nomor  
Register Hibah)



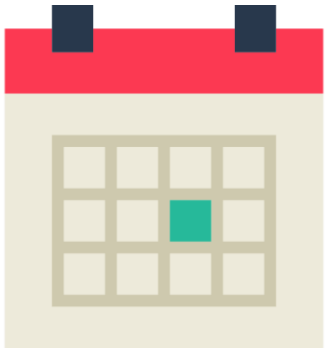
**Pengesahan  
Hibah**



**Pencatatan  
Hibah setelah  
mendapatkan  
Persetujuan  
MPHL BJS**

Pengajuan permohonan nomor register hibah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 dan **dilampiri dengan Hasil Reviu APIP Kementerian/Lembaga atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga**

# BATAS WAKTU PENYELESAIAN



## Batas Waktu



Pengajuan permohonan register hibah ke:

1. **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan** untuk Hibah yang berasal dari **Dalam Negeri**; atau
2. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen** untuk Hibah yang berasal dari **Luar Negeri**

paling lambat tanggal **16 November 2018**.



Pengesahan Hibah Barang/Jasa TAYL ke KPPN:

Paling lambat tanggal **26 November 2018**





# Terima Kasih

